

PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI USAHA MIKRO KONVEKSI

ABDUL HAMID

ABSTRACT

To begin with, there are two alternatives for women to expand their economy through micro garment business. Firstly, self-taught learning or independently studying by undergoing the trials and collecting the information related to tailoring and screen printing skills. Secondly, learning those through the course or training institution. Through this article, furthermore, women could easily fight for their own war of financial problem of theirs.

Keywords: Enhancement, Economy, Micro Garment Business

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada era ekonomi global ini setiap Negara diwajibkan untuk menunjukkan produksi hasil kreativitas masing-masing agar mampu bersaing dengan Negara lainnya. Di Asia Tenggara sendiri, Indonesia telah sepakat dengan Negara-negara lainnya (Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Thailand dan Kamboja) untuk mengadakan perdagangan bebas antar Negara se-Asia Tenggara yang dikenal dengan *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Untuk menunjang kerjasama ini, tentu saja seluruh bangsa Indonesia khususnya pelaku usaha dituntut untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas produksinya agar mampu bersaing atau bahkan mengungguli produk dari Negara lain. Oleh sebab itu, untuk menunjang harapan ini maka perlu dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, khususnya perempuan karena masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak karena perempuan masih dianggap lebih lemah sehingga dalam memperebutkan lapangan pekerjaan yang tersedia perempuan cenderung kalah saing dengan laki-laki. Padahal jumlah perempuan di Indonesia tidaklah sedikit. Di Provinsi Kalimantan Barat misalnya, berdasarkan hasil perhitungan per 30 Juni 2016 jumlah perempuan secara keseluruhan mencapai 2.586.576 Jiwa.⁸⁸

Jika fenomena ini dibiarkan berlarut-larut maka tidak menutup kemungkinan perempuan-perempuan yang ada di Negara ini tidak bias lagi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dapat menambah jumlah pengangguran yang dapat menghambat pembangunan nasional dan mengurangi kreativitas serta produktivitas Negara ini yang pada ujungnya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang konsumtif bukannya produktif.

Salah satu langkah kongkrit yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi tantangan di atas adalah dengan memberdayakan perempuan sebaik-baiknya agar dapat menunjang cita-cita luhur untuk memajukan Negara tercinta ini. Ife mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan

⁸⁸Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. <http://dukcapil.kalbarprov.go.id/statistik.html> (diakses 11 Desember 2015)

dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada didaerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan.⁸⁹

Kaitannya dengan pemberdayaan perempuan berarti proses menyiapkan perempuan dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menentukan masa depan, serta berpartisipasi dalam komunitasnya dengan tujuan untuk mewujudkan perempuan yang mandiri, mampu memanfaatkan sumber daya alam sekitar dan membebaskan diri dari keterbelakangan serta kemiskinan. Salah satu bentuk pemberdayaan perempuan adalah dengan mendidiknya menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ketentuan umum Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁹⁰

Berdasarkan Undang-undang di atas, usaha yang sangat terjangkau bagi para perempuan yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah adalah usaha mikro, karena tidak memerlukan modal yang besar sehingga memudahkan bagi perempuan untuk memulai usaha ini tanpa harus memikirkan cara mendapatkan modal yang besar. Salah satu bentuk usaha mikro yang dapat dilakukan di rumah tanpa harus meninggalkan kewajiban ibu rumah tangga adalah usaha konveksi kaos. Konveksi kaos adalah usaha jasa yang menyediakan berbagai produk berupa kaos olah raga, seragam sekolah, jaket, dasi dan produk konveksi lainnya.

B. Tujuan

Artikel ini ditulis untuk mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

⁸⁹Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Press. 2010), hlm. 113.

⁹⁰Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Ketentuan Umum dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. hlm. 5-6

- a. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
- b. Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah
- c. Konsep dan Profil Usaha Mikro Konveksi
- d. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Usaha Mikro Konveksi

PEMBAHASAN

KONSEP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana seseorang, rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.⁹¹ Kindervatter menekankan konsep pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan dalam bentuk pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik sehingga pada akhirnya mereka mampu memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya di masyarakat.⁹² Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara.⁹³ Pemberdayaan yang dimaksud bukanlah menggantikan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga melainkan diberikan porsi yang sama dengan laki-laki dalam mempertimbangkan sesuatu.

Dalam keluarga misalnya, perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memberikan kontribusi pendapat serta kritikan yang membangun dalam penentuan kebijakan kehidupan keluarga seperti menentukan sekolah anak, penataan ruangan di rumah, pengaturan keuangan keluarga, membuat suatu acara dan juga aktivitas-aktivitas keluarga lainnya.

Dalam lingkungan masyarakat perempuan juga harus diberi ruang untuk berperan aktif dalam kegiatan masyarakat serta diajak bermusyawarah apabila hendak mengadakan kegiatan masyarakat seperti gotong royong misalnya, jika laki-laki tugasnya mengerjakan kegiatan gotong royong maka kaum hawa bias diajak untuk menyediakan makanan sehingga secara tidak langsung, para perempuan merasa dihargai dan diperlukan kontribusinya.

Dalam lingkungan pasar perempuan juga harus diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkreasi menghasilkan suatu produk dan menjual hasil produknya, bersaing secara sehat dalam pemasaran produk tanpa harus dianggap lebih lemah, produknya lebih rendah dalam segi kualitas dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan bernegara perempuan juga harus diberikan kesempatan yang sama dalam membantu pembangunan Negara seperti perekrutan Aparatur Sipil Negara, pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Kepala Desa bahkan sampai lapisan pemerintah paling rendah sekalipun seperti pemilihan ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kepala Dusun.

Untuk memaksimalkan peran perempuan dalam berbagai ranah di atas, diperlukan pemberdayaan yang konkret bagi perempuan seperti bimbingan keterampilan tata Negara, keterampilan menyampaikan pendapat, keterampilan *leadership*, *enterpreneurship*, keterampilan berwirausaha, manajemen, dan keterampilan lainnya yang dapat menunjang peran aktif perempuan dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁹¹Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, cet. Ke-1, (Bandung: Mizan. 2003), hlm.35.

⁹²Zakiah, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*, (Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, XVII, 01 (Januari-Juni), 2010), hlm.44.

⁹³*Ibid*

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya.⁹⁴

Allah menyampaikan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan melalui firman-Nya:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبْرًا ۙ ١٢٤

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun” (Q.S. An-Nisa/4: 124).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, sudah jelas bahwa dalam melakukan kebaikan tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Keduanya memiliki hak dan peran yang sama bahwa amal dari keduanya (laki-laki dan perempuan) akan diterima jika dikerjakan atas dasar iman kepada Allah. Ibrah yang sangat besar dari ayat ini adalah bahwa manusia memiliki derajat dan nilai yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam berbuat kebaikan, termasuklah amal kebaikan meningkatkan ekonomi keluarga di dalamnya.

Dalam ayat lainnya yang berkaitan dengan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْتُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ ٧١

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah/9:71).

Ayat ini memberikan penegasan yang jelas bahwa mukmin (laki-laki) dan mukmin (perempuan) diciptakan Allah untuk saling tolong-menolong, saling melengkapi, saling mengisi dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya karena dengan demikianlah Allah akan memberikan Rahmat-Nya kepada yang berlaku demikian.

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam melakukan kebaikan. Oleh sebab itu sudah sepatutnya pemberdayaan terhadap kaum perempuan dilakukan agar para perempuan mampu mendukung roda perekonomian keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

⁹⁴Ismah Salman, *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah*. cet. Ke-1, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm.181.

Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peranperempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara:

- a. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah *konco wingking* (teman di belakang) bagi suami serta anggapan “*swarga nunut neraka katut*” (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Kata *nunut* dan *katut* dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami. Masih banyak kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi-tinggi sebab nantinya ia akan ikut apa yang dikatakan suaminya dan setinggi-tingginya perempuan belajar larinya juga ke dapur, kasar dan sumur.
- b. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai ketrampilan bisa diajarkan, diantaranya: ketrampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
- c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi-tinggi sebab nantinya ia akan ikut apa yang dikatakan suaminya dan setinggi-tingginya perempuan belajar larinya juga ke dapur, kasar dan sumur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan.

A. Konsep Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Dalam pembahasan mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat beberapa sudut pandang, yakni dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/omset pelaku UMKM. Berikut penjelasannya.:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :
 - 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
 - b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus jutarupiah).
 - 2) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (limapuluh milyar rupiah).
- c. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
- Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.
- d. Menurut Kementrian Keuangan
- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

B. Konsep Dan Profil Usaha Mikro Konveksi

a. Konsep Usaha Konveksi

konveksi adalah usaha di bidang busana jadi yang dibuat secara besar-besaran⁹⁵. Jadi, konveksi adalah perusahaan pakaian jadi yang dibuat secara besar-besaran. Maksud secara besar-besaran adalah barang yang diproduksi dibuat berdasarkan ukuran standar S, M, L, dan XL dalam jumlah yang banyak tidak berdasarkan ukuran personal. Busana jadi atau busana siap pakai (*ready-to-wear*) tidak diukur menurut pemesan, melainkan menggunakan ukuran standar atau ukuran yang telah dibakukan.

Busana konveksi dibuat lebih dari satu buah bahkan sampai 1000 buah per model. Mutu dari produksi konveksi mempunyai beberapa tingkatan, tergantung dari harga serta tingkatan yang membutuhkan. Adapun tingkatan mutu tersebut adalah:

- 1) Golongan kualitas rendah, contohnya pakaian yang dijual dikaki lima, harganya murah, jahitannya tidak kuat, cara memotongnya asal saja tidak memperhatikan arah serat, asal menghemat bahan dan kadang-kadang modelnya cukup menarik.
- 2) Golongan kualitas menengah, disediakan untuk golongan masyarakat menengah, harganya lebih tinggi dibanding golongan yang pertama, jahitan lebih rapi dan lebih kuat, penjualan di tempat yang lebih baik misalnya di toko-toko khusus busana.
- 3) Golongan kualitas tinggi diperuntukkan bagi orang-orang yang mempunyai banyak uang dan dari tingkatan atas berselera tinggi. Biasanya dijual pada *departement store* atau butik yang bergengsi, model dibuat dalam jumlah terbatas.⁹⁶

⁹⁵Sri Wening dan Sicilia Savitri, *Dasar Pengelolaan Usaha Busana*, (Yogyakarta: FPTK IKIP Yogyakarta. 1994), hlm. 23

⁹⁶Erni Lindhawati. 2008. *Pengelolaan Usaha Konveksi di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Hal. 4-5

Dibandingkan dengan usaha busana yang lain, usaha konveksi dapat dikatakan paling besar. Di Indonesia, usaha busana jadi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- 1) Industri kecil di rumah (*Home industry*). Biasanya pesanan datang dari dalam negeri yang jumlahnya tidak terlalu banyak, kualitas ada yang baik tetapi ada pula yang rendah, keuntungan yang diperoleh tidak terlalu besar, biasanya tidak menggunakan desainer hanya mencontoh.
 - 2) Industri besar. Biasanya berdasarkan pesanan/job order, sehingga kemungkinan rugi lebih sedikit, mutunya dari sedang sampai dengan yang baik, pemasaran ke dalam dan luar negeri, menggunakan mesin-mesin otomatis dengan kecepatan tinggi (*high speed machine*), sistem menjahit menggunakan sistem ban berjalan (*lopende band*).⁹⁷
- b. Profil Usaha Mikro Konveksi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada salah satu tempat pelaku usaha mikro konveksi yang berada di Kubu Raya, penulis mendapatkan informasi bahwa usaha ini telah berdiri sejak Tahun 2011 dan masih berjalan sampai saat ini. Badan usaha tersebut lebih fokus pada pembuatan perlengkapan sekolah seperti baju kaos olahraga, celana training, seragam batik, dasi, kerudung dan lain sebagainya.

Awalnya pemilik usaha hanya bermodalkan sebuah mesin jahit kecil dan sebuah mesin jahit besar khusus kaos serta mengerjakan semua pekerjaan konveksi sendiri karena kurangnya modal yang dimiliki sehingga belum mampu untuk mempekerjakan orang lain. Setelah lima tahun berjalan, badan usaha ini telah mempekerjakan lima orang perempuan yang rata-rata lulusan SMA dan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bahkan ada pula karyawan yang bekerja karena putus sekolah.

Badan usaha ini memiliki beberapa keunikan dibandingkan usaha konveksi lainnya. Diantaranya:

- 1) Proses pembuatan pakaian jadi tidak dilakukan seperti pada konveksi pada umumnya melainkan dilakukan seperti system garment yakni bagian desain sendiri, pemotongan sendiri, penjahitan sendiri bahkan bagian *finishing* seperti pembersihan benang, pemasangan kancing, pelipatan baju dan packing juga tersendiri.
- 2) Badan usaha ini juga menerima permaks pakaian seperti mengecilkan pakaian yang kebesaran, memotong pakaian yang kepanjangan dan lain sebagainya. Sehingga apabila pesanan pakaian jadi tidak terlalu ramai, para karyawan tetap bias bekerja secara normal tanpa khawatir akan diberhentikan atau diistirahatkan.
- 3) Seluruh karyawan yang bekerja pada badan usaha ini adalah perempuan yang mayoritas masih usia muda dan perlu bimbingan untuk lebih memahami usaha mikro dibidang konveksi.
- 4) Badan usaha ini juga memiliki peralatan sablon sendiri sehingga membantu percepatan pemenuhan pemesanan dan dapat dimanfaatkan oleh para karyawan untuk menimba ilmu sambil bekerja agar keterampilannya bertambah.

PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI USAHA MIKRO KONVEKSI

Sejarah Islam mencatatkan bahwa perempuan (muslimah) turut berperan aktif dan signifikan membangun peradaban, melakukan aktivitas sosial ekonomi, politik dan pendidikan serta

⁹⁷Erni Lindhawati. *Loc. cit*

perjuangan untuk kemaslahatan umat. Al-Ghazali dalam bukunya yang mengupas antara lain tentang bagaimana sikap Islam terhadap perempuan pada zaman modern dan sejauh mana aktivitas sosial seorang perempuan dibolehkan menurut ijthad fiqih Islam, menunjukkan adanya hadits palsu yang mengekang perempuan untuk bersekolah dan keluar rumah serta tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar meliputi kaum laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama.⁹⁸

Di negara-negara yang mayoritas penduduk muslim dengan ekonomi mapan, seperti Arab Saudi dan Kuwait tuntutan untuk dapat bekerja dan memilih pekerjaan merupakan masalah utama. Di Arab Saudi, hanya 5% perempuan bekerja dan terbatas pada pekerjaan zona domestik (seperti pekerjaan keagamaan, pendidikan dan perawatan). Malaysia dianggap sebagai simbol negara muslim yang berhasil memadukan tradisi dan modernitas dan potret keberhasilan peran perempuan dalam pembangunan, walaupun masih ada ketidakadilan dalam pendapatan karena laki-laki yang dituntut untuk bekerja atau mencari nafkah. Data tahun 2009, diperkirakan jumlah perempuan yang aktif dalam perekonomian 38%, dari hanya 7% tahun 1980 dan 8,5% tahun 1990. Di sektor pendidikan dan profesional bahkan jumlah perempuan melebihi laki-laki.⁹⁹

Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya akan Sumber Daya Alam serta kaya akan tradisi, adat dan budaya. Seharusnya potensi tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat atau bahkan Indonesia bisa menjadi pengatur roda perekonomian ASEAN bahkan dunia sekalipun, karena apa yang diperlukan oleh Negara lain semuanya ada di Indonesia. Namun faktanya sangatlah berbeda dengan apa yang diharapkan, hampir seluruh kebutuhan hidup baik sandang, papan, maupun pangan Indonesia harus mengimpor dari luar negeri.

Mirisnya lagi, semua potensi yang ada boleh dikatakan tidak berdampak pada kehidupan kaum hawa yang bergelut dibidang swasta. Hal ini dibuktikan dengan tidak sedikitnya perempuan-perempuan usia produktif yang memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara lain seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Negara-negara lainnya. Pekerjaan yang mereka dapatkan juga tidaklah selayak yang mereka harapkan kerana kebanyakan dari para pahlawan devisa Negara ini bekerja sebagai asisten rumah tangga yang kadang menerima perlakuan tidak menyenangkan seperti penganiayaan oleh majikan, pelecehan seksual, tidak menerima gaji berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun bekerja tanpa menerima upah sedikitpun.

Dalam kasus lain, tidak sedikit pula para pahlawan devisa Negara ini menjadi korban *human trafficking* (perdagangan manusia) dimana mereka dipekerjakan sebagai Penjual Seks Komersial (PSK) oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Lebih buruknya lagi, meskipun permasalahan-permasalahan ini sudah banyak dipublikasikan dan diketahui banyak kalangan ternyata tidak menimbulkan kekhawatiran yang berarti sehingga masih banyak perempuan di Indonesia yang mendaftarkan diri untuk menjadi TKW dan tentu saja dapat diramalkan bahwa kasus-kasus tersebut di atas dapat terulang kembali.

Menanggapi permasalahan-permasalahan di atas, pemerintah seyogyanya bergerak cepat melalui pemerintah daerah bahkan jika perlu pemerintah desa juga digerakkan untuk dapat memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di daerah dan di desa masing-masing agar mereka mendapatkan bimbingan berbagai macam keterampilan untuk memanfaatkan SDA yang ada untuk dijadikan produk komersial yang dapat meningkatkan taraf kehidupan dan membantu suaminya dalam menjalankan perekonomian keluarga.

⁹⁸Abdullah Abbas. *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman*, (Ciputat: Lentera Hati. 2010), hlm.716-725.

⁹⁹Farinia Fianto, "Pekerja Perempuan di Dua Negeri Islam", dalam <http://www.rahima.or.id/index.php>, 1-4 (9 April). Diakses 13 Desember 2016

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong perempuan untuk berani dan yakin untuk memulai usaha secara mandiri seperti usaha mikro contohnya. Untuk memulai usaha mikro tidaklah diperlukan modal yang sangat besar karena dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 telah dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Modal ini bisa didapatkan dengan meminjam di Bank atau memanfaatkan program pemerintah seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun demikian, Meskipun pemerintah telah berupaya untuk mendorong perempuan memulai usaha mikro dengan adanya program KUR misalnya, ternyata tetap saja hanya beberapa orang yang berani untuk memulai usaha dan sebagian besar masih enggan untuk memanfaatkan program tersebut.

Melihat permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa modal bukanlah satu-satunya penghambat bagi perempuan untuk memulai usaha. Hambatan lain yang jauh lebih sulit untuk diatasi adalah tidak adanya keterampilan mumpuni yang dimiliki para perempuan sehingga hal tersebut sangat menghambat perkembangan usaha mikro atau usaha rumahan (*home industry*) di Indonesia pada umumnya dan daerah-daerah terpencil khususnya.

Permasalahan lainnya yang dapat ditimbulkan akibat tidak diberdayakannya perempuan adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Padahal jika saja satu usaha mikro berjalan dapat mempekerjakan 5-10 orang maka 10 usaha mikro dapat menyerap 50-100 tenaga kerja, bayangkan jika di satu wilayah terdapat 100 usaha mikro yang aktif maka 500-1000 tenaga kerja perempuan yang dapat diserap dan tentu saja dapat meningkatkan perekonomian perempuan di wilayah tersebut. Jika cita-cita ini tercapai maka dapat dipastikan para perempuan tidak akan menjadikan TKW sebagai pilihan pertama untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga.

Masalah lainnya yang tidak kalah penting untuk diperhatikan akibat kurangnya pemberdayaan perempuan adalah bingungnya perempuan dalam membaca peluang pangsa pasar sehingga seolah-olah semua pangsa pasar telah dipenuhi oleh orang lain dan tidak ada lagi jenis usaha rumahan yang dapat dilakoninya. Padahal ada tiga jenis kebutuhan primer manusia yang sampai kapanpun tidak akan pernah mati yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Berbicara mengenai kebutuhan manusia, salah satu yang masih luas pangsa pasarnya yaitu kebutuhan sandang. Banyaknya pakaian impor yang harganya sangat mahal serta juga banyaknya pakaian lokal yang kualitasnya masih kurang baik merupakan pangsa pasar yang sangat luas bagi perempuan yang ingin memulai usaha mikro dibidang busana. Tugas utamanya hanyalah bagaimana menciptakan produk busana yang berkualitas baik namun harganya terjangkau bagi semua kalangan.

Salah satu jenis usaha dibidang kebutuhan sandang adalah usaha konveksi. Membahas tentang usaha konveksi sebenarnya banyak jenis yang dapat ditekuni tergantung pangsa pasar yang ada di daerah pelaku usaha. Satu contoh, jika pelaku usaha tinggal di daerah lingkungan pesantren, maka jenis konveksi yang dapat ditekuni berupa produksi kopiah, kerudung, sarung, mukena, kemeja, seragam pesantren, seragam sekolah, baju gamis dan lain sebagainya. Jika pelaku usaha berada di lingkungan sekolah maka jenis konveksi yang dapat ditekuni adalah produk-produk yang dibutuhkan masyarakat sekolah seperti perlengkapan olahraga (kaos dan celana), seragam sekolah (kemeja putih, batik, pramuka, celana merah, hijau, biru donker, abu-abu dan celana pramuka), seragam guru (baju KORPRI, PGRI, dan lainnya). Begitu pula dengan

lingkungan sekitar lainnya seperti di lingkungan perguruan tinggi, lingkungan perkantoran, lingkungan pasar dan lingkungan lainnya.

Dalam usaha konveksi sebenarnya banyak peluang kerja yang bisa ditekuni tergantung kemampuan dan keterampilan masing-masing yang dimiliki pelaku usaha. Proses produksi pakaian jadi bisa saja dilakukan dengan model konveksi sebenarnya yaitu satu orang mengerjakan satu jenis pakaian mulai dari rancangan sampai penyelesaian bahkan sampai pengemasan. Namun bisa pula produksi pakaian jadi dilakukan dengan model garment dimana masing-masing tahapan produksi dilakukan oleh orang yang berbeda. Berikut penulis sajikan dalam bentuk table mengenai tugas yang terdapat dalam usaha bidang konveksi model garment:

No.	Keterampilan	Tugas
1	<i>Design</i>	Merancang bentuk dan pola pakaian
2	<i>Cutting</i>	Memotong kain
3	<i>Computing</i>	Desain model gambar sablon
4	<i>Filming</i>	Membuat afdruck sablon
5	<i>Painting</i>	Mencetak gambar pada pakaian
6	<i>Drying</i>	Mengeringkan dan memeriksa kualitas
7	<i>Washing</i>	Membersihkan perlengkapan sablon
8	<i>Sewing</i>	Menjahit dan menyatukan pakaian
9	<i>Finishing</i>	Membersihkan benang dan setrika
10	<i>Packing</i>	Mengemas pakaian jadi
11	<i>Delivery</i>	Mengantar dan mengambil pesanan

Sumber: hasil observasi terhadap pelaku usaha konveksi

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama dalam dunia usaha konveksi adalah perancangan (*design*), setiap pelanggan yang memesan pakaian pasti memiliki model, jenis dan ukuran yang berbeda, oleh sebab itu perancang harus memahami betul kriteria pakaian yang dipesan agar sesuai dengan keinginan pemesan. Setelah rancangan selesai selanjutnya dibuat pola dasar untuk digunakan sebagai pola ketika pemotongan kain.
- b. Setelah pola dasar selesai, tahap selanjutnya adalah pemotongan (*cutting*), pada tahap ini pemotongan kain harus sama persis dengan pola yang telah dibuat oleh perancang. Sebab jika tidak maka bentuk pakaian yang jadi akan berbeda dengan model yang dipesan.
- c. Bagi perempuan yang menguasai program computer seperti *Photoshop* dan *Coreldraw* bisa memanfaatkan kemampuannya untuk merancang gambar sablon sesuai dengan pola gambar yang diminta pemesan. Pada umumnya jika pesanan dari sekolah gambar yang diminta berupa logo sekolah (logo PAUD, logo TK, logo Tutwurihandayani, logo OSIS, logo Kemenag dan Tunas Kelapa). Gambar lainnya dapat juga berupa tulisan nama sekolah pada punggung baju kaos atau lis celana olahraga, namun untuk pesanan umum atau komunitas pada umumnya gambar lebih variatif.
- d. Tahap kedua pembuatan sablon adalah *filming*, pada tahap ini tugas utamanya adalah membuat afdruck (film sablon). Afdruck adalah pola gambar yang dicetak pada kain kassa (screen) yang kemudian akan digunakan untuk mencetak gambar pada permukaan pakaian yang akan diproduksi.

- e. Tahap *painting* adalah tahap pengecatan atau pencetakan gambar pada permukaan kain yang akan diproduksi dengan menggunakan pola gambar yang telah dicetak pada afdruk sablon.
- f. Tahap keempat pada proses sablon adalah pengeringan (*drying*), pada tahap ini bisa saja pengeringan dilakukan secara alami namun jika diperlukan secepatnya maka pengeringan bisa juga dilakukan dengan *hair dryer*, pada tahap ini juga diperlukan ketelitian untuk memeriksa kualitas sablon, jika ada gambar yang tidak sempurna bisa diperbaiki lagi dengan cara disablon ulang.
- g. Tahap terakhir dari proses sablon adalah penyucian perlengkapan sablon (*washing*), sebelum tahap ini dilakukan sebaiknya dipastikan bahwa semua tahap sablon telah dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gambar yang cacat karena ketika perlengkapan telah dicuci maka semuanya tidak bisa digunakan lagi kecuali harus memulai ulang lagi dari tahap pertama. Proses sablon bisa saja dilakukan setelah pakaian selesai dijahit, namun agar memudahkan proses sablon sebaiknya dilakukan sebelum pakaian dijahit.
- h. Setelah proses sablon selesai, selanjutnya adalah bagian menjahit (*sewing*), tahap ini merupakan tahap inti dari proses produksi pakaian jadi karena pada tahap ini tugas penjahit adalah menyatukan seluruh komponen-komponen pakaian seperti abagian tangan, leher, bagian depan dan bagian belakang dijadikan satu kesatuan agar menjadi pakaian siap pakai (pakaian jadi).
- i. Setelah pakaian jadi selesai dijahit, tahap selanjutnya adalah tahap penyelesaian (*finishing*), pada tahap ini tugas yang harus dikerjakan adalah membersihkan sisa-sisa benang yang ada pada pakaian agar tidak terkesan kotor dan lebih berkesan rapi. Dalam tahap ini pekerja juga harus memeriksa kualitas jahitan agar tidak ada bagian yang belum terjahit atau terlewat yang akan berdampak pada rendahnya kualitas terhadap barang yang diproduksi. Tugas lainnya pada tahap ini adalah merapikan pakaian dengan setrika, meskipun tidak mutlak diperlukan, proses setrika ini juga dapat dilakukan agar menambah nilai kualitas produk di mata konsumen.
- j. Setelah dipastikan bahwa semua jahitan telah sempurna dan sudah dirapikan, tahap terakhir yang perlu dilakukan sebelum produk dipasarkan adalah proses pengemasan (*packing*), tugas yang dilakukan pada tahap ini adalah membungkus pakaian yang telah siap untuk dipasarkan, pembungkusan bisa dilakukan dengan per unit atau per ukuran (S, M, L, XL).
- k. Tahap penutup dari usaha konveksi adalah pengiriman barang kepada pemesan (*delivery*), tahap ini pada umumnya dilakukan pada pemesanan yang lokasi pemesan dengan tempat usaha jauh sehingga diperlukan jasa pengiriman barang.

Dari pemaparan tahapan produksi usaha konveksi di atas, dapat diketahui bahwa dalam satu badan usaha saja diperlukan 10-11 tahap untuk menciptakan satu produk pakaian jadi dan juga diperlukan 5-10 orang karyawan untuk menyelesaikan satu jenis pakaian jadi. Dengan demikian maka sudah jelas bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan dapat dilakukan melalui usaha mikro bidang konveksi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua cara untuk memberdayakan ekonomi perempuan melalui usaha mikro konveksi, yaitu *pertama*, mengambil beberapa perempuan untuk dibimbing seluruh keterampilan usaha konveksi mulai dari tahap *design* sampai *finishing*; kedua, masing-masing personal diberi bimbingan berbeda yakni dengan cara keterampilan pada masing-masing tahap diberikan pada masing-masing satu personal sehingga jika semuanya membentuk kelompok maka akan saling menyelesaikan tiap tahap dari proses produksi usaha konveksi.

Kedua cara ini memiliki tujuan yang sama dalam memberdayakan ekonomi perempuan melalui usaha mikro bidang konveksi namun memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.

Cara pertama dapat mencetak perempuan yang serba bias dalam melakoni usaha mikro bidang konveksi akan tetapi memerlukan waktu yang relative lama agar seluruh perempuan yang dibimbing dapat menguasai seluruh keterampilan yang diberikan. Adapun cara kedua sebaliknya, waktu yang diperlukan relative lebih sedikit karena masing-masing personal hanya dituntut untuk menguasai satu keterampilan, namun para perempuan ini tidak bias mendirikan usaha sendiri-sendiri karena mereka saling memerlukan atara satu dengan yang lainnya.

Secara garis besar, terdapat dua alternatif bagi perempuan untuk mengembangkan ekonomi melalui usaha mikro konveksi, yakni pertama, belajar secara otodidak yaitu belajar mandiri dengan melakukan percobaan-percobaan serta mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan keterampilan menjahit dan sablon; kedua, melalui lembaga kursus atau lembaga pelatihan. Program-program yang dapat diperoleh dari lembaga kursus dan pelatihan seperti yang tertuang dalam pasal 103 ayat (2) PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah antara lain sebagai berikut: (1). Pendidikan kecakapan hidup; (2). Pendidikan kepemudaan; (3). Pendidikan pemberdayaan perempuan; (4). Pendidikan keaksaraan; (5). Pendidikan keterampilan kerja; (6). Pendidikan kesetaraan dan/atau; (7). Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abbas. 2010. *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman*. Diterjemahkan dari Mi'atu Su'al'An Al-Islam Karya Syaikh Muhammad Al-Ghazali. Ciputut: Lentera Hati.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. [http:// dukcapil. kalbarprov. go. id/statistik](http://dukcapil.kalbarprov.go.id/statistik). Html
- Edi Suharto. 2003. *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan.
- Erni Lindhawati. 2008. *Pengelolaan Usaha Konveksi di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
- Farinia Fianto. 2012. "Pekerja Perempuan di Dua Negeri Islam", dalam [http:// www. rahima. or. id/ index.php](http://www.rahima.or.id/index.php), 1-4 (9April). Diakses 13 Desember 2016
- Ismah Salman. 2005. *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah
- Nanang Martono. 2010. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Press
- Sri Wening dan Sicilia Savitri. 1994. *Dasar Pengelolaan Usaha Busana*. Yogyakarta: FPTK IKIP
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Ketentuan Umum dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*
- Zakiyah. 2010. *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*, Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, XVII, 01 (Januari-Juni)